

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

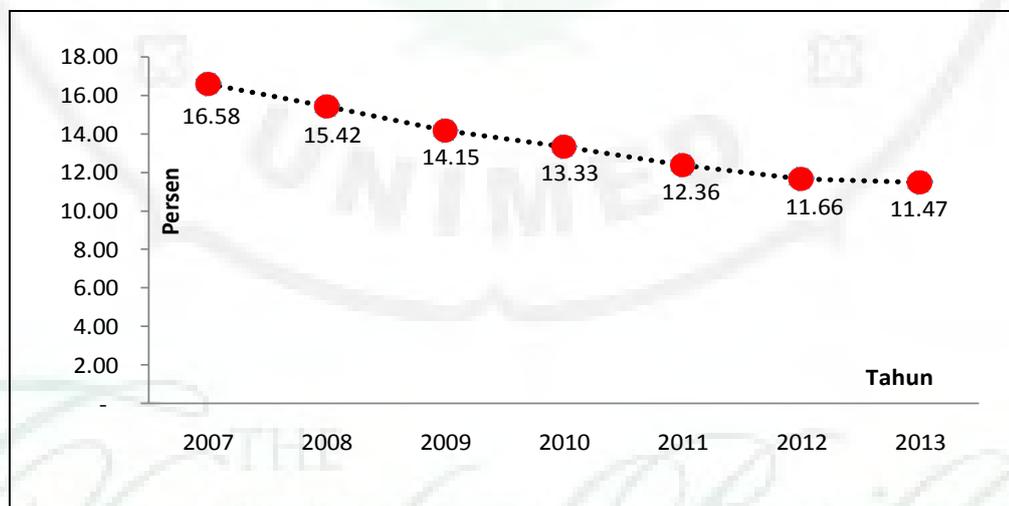
Pembangunan memiliki tujuan yang utama dan sekaligus merupakan salah satu indikator keefektifan program-program pembangunan, tujuan utama tersebut adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada pada lapisan terendah menuju ke lapisan yang lebih baik dengan kata lain menurunkan kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya.

Kemiskinan menimbulkan permasalahan sosial didalam kehidupan masyarakat misalnya : naiknya angka kriminal, munculnya berbagai penyakit dipemukiman kumuh, bahkan di negara Afrika muncul busung lapar dan lain sebagainya.

Dalam kaitan ini berbagai program telah dan sedang dilaksanakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Sejak tahun 1960-an pemerintah telah membentuk sebuah program penurunan angka kemiskinan dengan menggunakan strategi memenuhi kebutuhan dasar manusia yang disebut Penasbede (Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun). Namun program ini terhenti di tahun 1965 disebabkan krisis politik. Tahun 1970-an, pemerintah kembali membuat program penurunan angka kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), namun hingga tahun 2000-an pemerintah belum berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Dengan melihat pengalaman ditahun sebelumnya dalam menuntaskan masalah kemiskinan, tahun 2007 pemerintah mengambil langkah-langkah

konsolidasi program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan dibagi dalam tiga cluster yaitu Paket Bantuan Program I yang merupakan bantuan dan perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, beras miskin/ raskin, jaminan kesehatan masyarakat/ jamkesmas, Program Keluarga Harapan/ PKH, Bantuan operasional Sekolah/ BOS, bantuan sosial untuk pengungsi/ korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain-lain), Paket Bantuan II yang merupakan program pemberdayaan masyarakat, dan paket Bantuan Program III yang merupakan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK-KUR). Hasilnya adalah Jumlah dan persentase penduduk miskin turun dari tahun 2007 sebesar 16,58% menjadi sebesar 11,47% di tahun 2013 (BPS, 2014). Prosentase penduduk miskin di Indonesia 7 tahun terakhir seperti pada gambar 1.1 berikut.



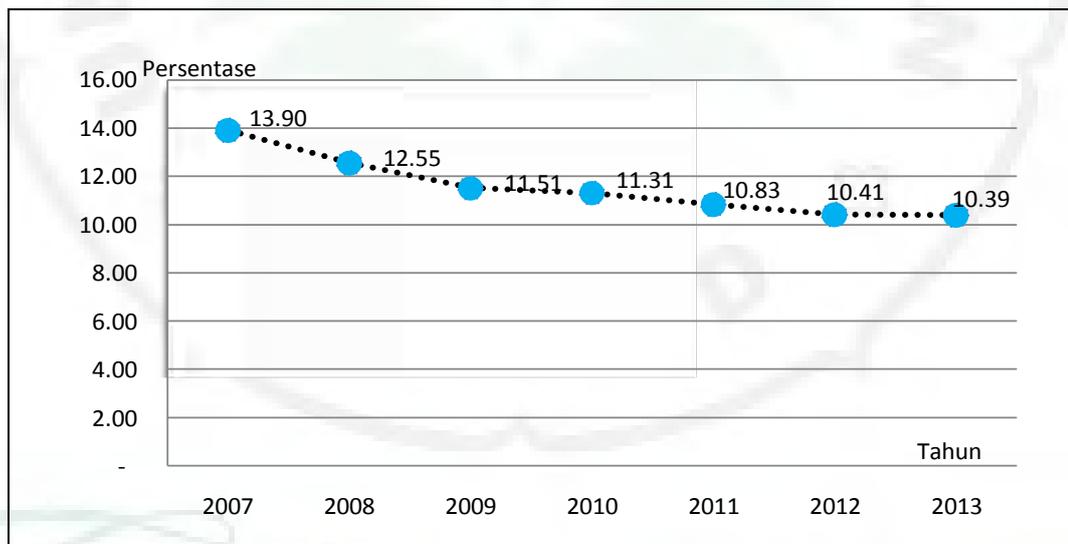
Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2014 (diolah)

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007 – 2013

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa penduduk miskin dari tahun 2007 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2007 sebesar 16,58 persen turun ditahun 2008 hingga tahun 2013 masing-masing menjadi sebesar 15,42 persen di tahun 2008, sebesar 14,15 persen di tahun 2009, sebesar 13,33

persen di tahun 2010, sebesar 12,36 persen di tahun 2011 dan sebesar 11,66 persen di tahun 2012 serta sebesar 11,47 persen di tahun 2013. Namun demikian banyak pihak menilai penurunan tersebut belum signifikan terutama jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dibelanjakan. Tercatat di tahun 2004 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan hingga mencapai Rp. 18 triliun bahkan di tahun 2007 anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan meningkat tajam hingga mencapai Rp. 106,8 triliun.

Di Sumatera Utara, penduduk miskin pada tahun 2007 berdasarkan data BPS sebanyak 13,23 persen. Perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut.



Sumber : BPS, Sumatera Utara, 2007-2013, (diolah)

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2007-2013

Dari Gambar 1.2. tampak bahwa selama kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2013 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara relatif terus mengalami penurunan, bahkan ditahun 2008 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu dari 13,90 persen di tahun 2007 menjadi sebesar 12,55 persen di tahun 2008. Tahun 2009 hingga tahun 2013 terjadi penurunan menjadi sebesar 11,51 persen di

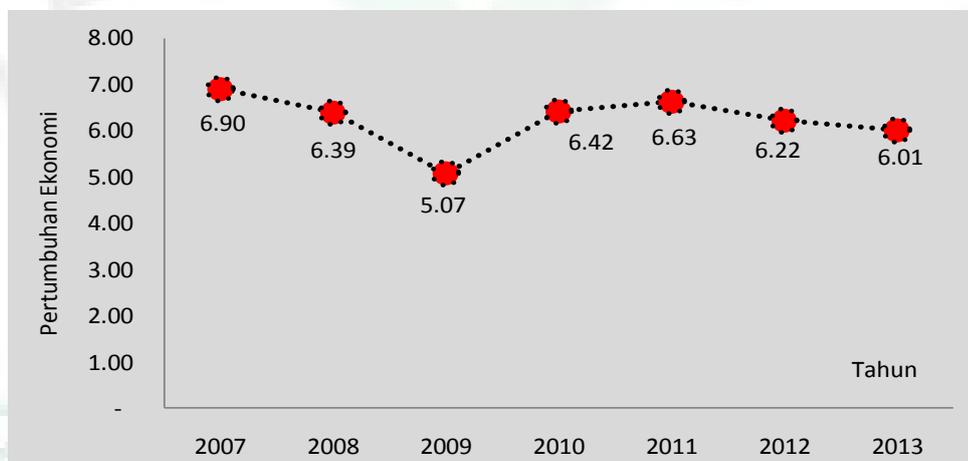
tahun 2009, sebesar 11,31 persen di tahun 2010, sebesar 10,83 persen di tahun 2011 dan sebesar 10,41 persen di tahun 2012 serta menjadi sebesar 10,39 persen di tahun 2013.

Walaupun jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2007 - 2013 mengalami penurunan namun keadaan ini dirasakan masih terlalu tinggi sehingga perlu dicari solusi yang tepat untuk penanggulangan masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan yang terjadi pada sekelompok masyarakat berkaitan dengan faktor potensi wilayah dan status sosial ekonominya. Faktor yang berasal dari potensi wilayah adalah faktor dari luar diri masyarakat itu, yaitu yang berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi yang rendah. Sedangkan faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya.

Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, yaitu faktor rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan kebebasan, ketiga aspek ini memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya income perkapita.

Sedangkan Maipita (2013; 68) menyebutkan beberapa faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah, sumber daya alam yang terbatas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif.

Sesuai dengan yang disampaikan Maipita dan Todaro diatas bahwa salah satu penyebab faktor kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000, dari tahun 2007 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan. Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara kurun waktu tahun 2007-2013.



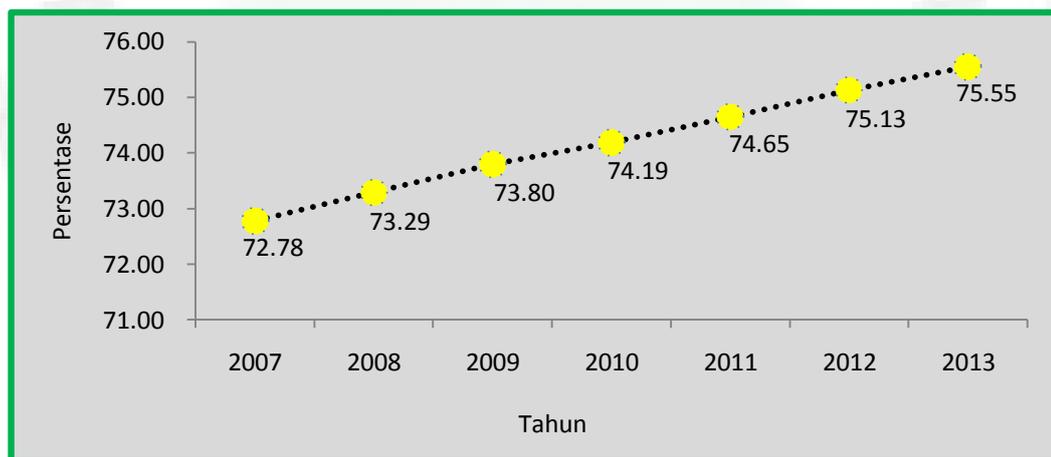
Sumber : BPS, Sumatera Utara, 2007-2013 (diolah)

Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2007 – 2013

Dari gambar 1.3. terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang proporsional. Artinya bahwa tidak dengan secara otomatis kenaikan pertumbuhan ekonomi akan memberi dampak penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera

Utara. Seperti yang terjadi pada tahun 2003 dan 2006 dimana pertumbuhan ekonomi naik tingkat kemiskinan juga naik.

Sementara itu IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dijadikan dasar penentuan keberhasilan penanggulangan kemiskinan meliputi tingkat pendidikan, kesehatan dan paritas pendapatan masyarakat. Tahun 2007 IPM provinsi Sumatera Utara sebesar 72,78, tahun 2008 sampai tahun 2013 berturut-turut IPM provinsi Sumatera Utara sebesar 73,29, 73,80, 74,19, 74,65, 75,13 dan 75,55. Perkembangan IPM di Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 1.4. berikut ini.



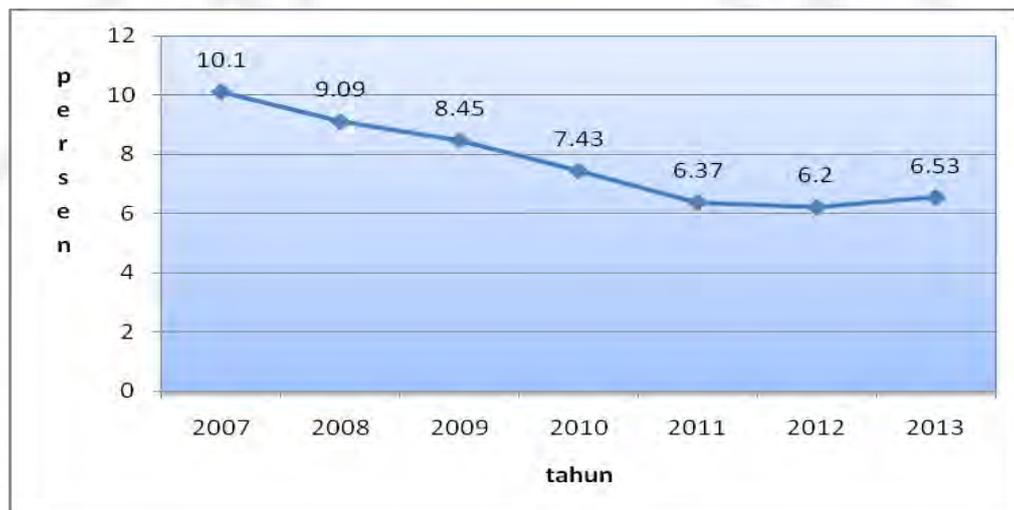
Sumber : BPS Sumatera Utara, 2007 – 2013 (diolah)

Gambar 1.4. Tingkat IPM di Sumatera Utara Tahun 2007 – 2013

Jika dilihat perkembangan tingkat IPM di Sumatera Utara selama kurun waktu 2007 – 2013 yang secara perlahan meningkat sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada periode tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa antara tingkat IPM dan jumlah penduduk miskin relatif memiliki hubungan yang kuat.

Disamping masalah pertumbuhan ekonomi dan IPM yang diduga kuat

memiliki korelasi dengan jumlah penduduk miskin, adalah tingkat pengangguran (seperti yang disampaikan Todaro diatas) atau sering disebut tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di propinsi Sumatera Utara menurut data BPS, seperti pada gambar 1.5 berikut:



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2007 – 2013 (diolah)

Gambar 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut Th 2007 – 2013

Gambar 1.5 menjelaskan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara secara umum dari tahun 2007 sampai tahun 2012 relatif menurun, tetapi naik lagi di th 2013. Tahun 2007 TPT sebesar 10,10 persen dan di tahun 2008 TPT sebesar 9,09%, kembali mengalami penurunan di th 2009 menjadi sebesar 8,45 persen, di th 2010 sebesar 7,43 persen, di th 2011 menjadi sebesar 6,37 persen, di th 2012 menjadi 6,20 persen, tetapi th 2013 naik menjadi sebesar 6,58 persen. Penurunan ini sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam hal ketenagakerjaan. Namun penurunan ini masih dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan alokasi anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dalam menangani masalah ini.

Dalam penanggulangan kemiskinan ini sebenarnya pemerintah telah mem-

buat berbagai program penanggulangan kemiskinan antara lain : Program Beras Miskin (RASKIN), Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin), Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dari program-program yang dilaksanakan pemerintah telah berhasil memperkecil angka kemiskinan namun bila dilihat data di tahun 2013 tingkat pengangguran meningkat kembali sementara PDRB juga meningkat.

Dari uraian dan penjelasan diatas dan atas dasar pemikiran tersebut, penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti masalah “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara**”. Karena Pertumbuhan Ekonomi dan IPM ditentukan oleh beberapa variabel maka dalam penelitian ini juga akan menganalisis variabel pembentuk IPM (harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan menganalisis variabel Kinerja perekonomian (pendapatan perkapita, jumlah penduduk) terhadap IPM.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian tersebut, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara?

2. Bagaimana pengaruh harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli (variabel pembentuk IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk (variabel kinerja perekonomian) terhadap IPM di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat dalam bidang Keilmuan adalah:

- a. Sebagai masukan bagi ilmu Ekonomi khususnya tentang kemiskinan.
- b. Sebagai landasan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang kemiskinan di Sumatera Utara.

1.4.2. Sedangkan manfaat dalam Penerapan.

- a. Sebagai alat evaluasi Pemerintah Sumatera Utara dalam kerangka arah pembangunan apakah berperspektif pembangunan *propoor* atau tidak.
- b. Sebagai bahan ajar tentang Pengaruh IPM dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.